



LAPORAN PPID TRIWULAN IV

Periode Oktober-Desember

2024

Pusat Pengembangan
Kompetensi Manajemen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik – Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Triwulan IV Periode Oktober s.d Desember 2024.

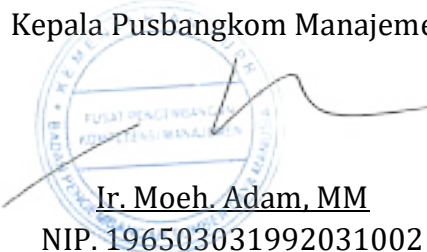
Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas implementasi kegiatan publikasi yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen sebagaimana menjadi salah satu tugas tambahan dalam pengelolaan kegiatan di lingkungan Pusat. Bentuk kegiatan publikasi yang dilakukan meliputi publikasi secara digital maupun cetak yang menitikberatkan pada capaian kegiatan serta informasi-informasi terkait kegiatan pengembangan kompetensi sehingga khalayak selain dapat mengetahui kegiatan yang dilaksanakan juga ke depan dapat tertarik dan turut serta dalam mengikuti kegiatan dimaksud.

Pada laporan yang telah tersusun ini, kami menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan berikutnya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja Petugas Layanan Informasi dalam melakukan penyajian informasi, kinerja dan peran Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan SDM - Kementerian PUPR dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM PUPR melalui pelayanan informasi bagi publik.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pengarah PPID Daerah Tipe I
Kepala Pusbangkom Manajemen



Ir. Moeh. Adam, MM
NIP. 196503031992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Maksud dan Tujuan.....	7
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP	8
2.2. Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP	9
2.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	12
2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik.....	16
2.5. Kondisi Layanan Informasi Publik.....	23
2.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik.....	30
BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	38
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui e-PPID.....	13
Tabel 2 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui e-PPID BPSDM	13
Tabel 3 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui R. Layanan Informasi	14
Tabel 4 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID PUPR	14
Tabel 5 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID BPSDM	14
Tabel 6 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui R. Layanan Informasi.....	15
Tabel 7 - Status Pelayanan Informasi	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Pendokumentasian Kegiatan Internal Pusbangkom Manajemen	9
Gambar 2 - Pengarsipan Dokumentasi Kegiatan.....	10
Gambar 3 – Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Media Sosial BPSDM	10
Gambar 4 - Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Website BPSDM.....	11
Gambar 5 - Publikasi Informasi melalui X-Banner	11
Gambar 6 - Publikasi di TV Corner	11
Gambar 7 - Publikasi Informasi di Info Dinding.....	12
Gambar 8 - Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen	16
Gambar 9 - Laporan PPID per-Triwulan Pusbangkom Manajemen	17
Gambar 10 - Laporan Kinerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2024	17
Gambar 11 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020.....	18
Gambar 12 - Tangkapan Layar YouTube BPSDM	18
Gambar 13 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020.....	18
Gambar 14 - Dasar Hukum PPID Pusbangkom Manajemen	19
Gambar 15 - Biaya, Media, dan Waktu Pelayanan	19
Gambar 16 - Produk Hukum Pusbangkom Manajemen	19
Gambar 17 - Profil Pelatihan dan Struktur Pusbangkom Manajemen	20
Gambar 18 - SK PPID Pusbangkom Manajemen.....	20
Gambar 19 - SOP PPID.....	20
Gambar 20 - Struktur PPID Pusbangkom Manajemen	20
Gambar 21 - Tugas dan Fungsi PPID Pusbangkom Manajemen	21
Gambar 22 - Profil Singkat PPID Pusbangkom Manajemen.....	21
Gambar 23 - Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen.....	21
Gambar 24 - Maklumat Layanan PPID Pusbangkom Manajemen.....	21
Gambar 25 - Mekanisme Pelayanan PPID Pusbangkom Manajemen.....	22
Gambar 26 - Jadwal Petugas Layanan Informasi.....	22
Gambar 27 - Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi.....	22
Gambar 28 - Jadwal Kepala Pusat Pusbangkom Manajemen.....	23
Gambar 29 - Capaian Pelatihan Pusbangkom Manajemen Tahun 2020	23
Gambar 30 - Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi, dan Profil Pelatihan Bidang Manajemen Tahun 2019.....	23
Gambar 31 - Struktur Organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sesuai SK 39/KPTS/MF/2024	26
Gambar 32 - Ruang Layanan Informasi Publik	27
Gambar 33 - Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik.....	27
Gambar 34 - Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Sosial.....	28
Gambar 35 - TV Corner	28
Gambar 36 - Info Dinding.....	29
Gambar 37 - X-Banner.....	29
Gambar 38 - Alat Dokumentasi	29
Gambar 39 - Video Animasi Mengenai Jurnal Infrastruktur	30
Gambar 40 - Video Dokumentasi Kegiatan & Pelatihan	30

Gambar 41 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Instagram BPSDM **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 43 - Tab Informasi Publik di website BPSDM31

Gambar 44 - Tangkapan Layar Berita di website BPSDM Juli-September37

Gambar 45 - Pigam dan Sertifikat Penghargaan PPID39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era keterbukaan informasi, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi dari berbagai media, dan informasi pun tersebar dalam waktu yang singkat. Berbagai institusi/organisasi pun berlomba-lomba melakukan penyebarluasan informasi tak terkecuali instansi pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pun menyampaikan perlunya publikasi kinerja pemerintah kepada masyarakat karena saat ini masyarakat perlu mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

Publikasi kinerja pemerintah pun ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sehingga tujuan pemerintah untuk penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, pelaksana PPID Pusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR adalah Bagian Data dan Informasi.

Untuk menjalankan fungsi PPID tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 63/KPTS/KM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyampaikan bahwa Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, merupakan PPID BPSDM Daerah Tipe I.

Adapun tugas dari Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I adalah:

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelola informasi dan dokumentasi di PPID BPSDM Daerah Tipe I;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I dalam proses penyelesaian sengketa informasi;
- c. Memberikan arahan kepala pelaksanaan tugas Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I; dan
- d. Melaksanakan koordinasi dan memberikan tembusan pelaporan kepala Pengarah PPID BPSDM.

Sedangkan jenis pelayanan informasi Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I yang diberikan kepada publik adalah:

- a. Informasi Pelatihan: meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan diklat, persyaratan peserta, dan tata cara registrasi untuk mengikuti diklat, serta rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat).
- b. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan: meliputi jadwal pelaksanaan rekrutmen, pengajuan surat rekomendasi beasiswa yang masuk menjadi salah satu persyaratan utama dalam mengajukan beasiswa, dan tata cara pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi beasiswa (berkala);
- c. Informasi Kinerja: Meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen (Pusbangkom Manajemen) Triwulan I Periode Januari-Maret Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman stakeholders terkait mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajemen di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pelaporan kepada PPID Pusat BPSDM.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Menyebarkan informasi mengenai tugas, fungsi, program dan kegiatan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen kepada Pegawai Kementerian PUPR dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), masyarakat umum, kalangan akademisi, dan pers;
- b. Meningkatkan pengetahuan stakeholders terkait mengenai Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
- c. Melengkapi kebutuhan data PPID Pusat BPSDM; dan
- d. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan arahan dan kebijakan selanjutnya.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang di jelaskan pula dalam Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2018 tentang SAKIP yang menjadi acuan Pusbangkom Manajemen untuk mempublikasi informasi terutama capaian kinerja dari Pusbangkom Manajemen.

Untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 24/KPTS/KM/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84/KPTS/KM/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 24/KPTS/MF/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 84/KPTS/MF/2021 Tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Adapun beberapa tugas dari PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen (Pusbangkom Manajemen) adalah:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di masing - masing unit organisasi (unor);
- b. Menyediakan Dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
- c. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi pada unor terkait;
- d. Membantu PPID Pusat dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
- e. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Pusat.

Sedangkan jenis pelayanan informasi PPID Pusbangkom Manajemen yang diberikan kepada publik adalah:

a. Informasi Pelatihan

Meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan diklat, persyaratan peserta, dan tata cara registrasi untuk mengikuti diklat, serta rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat).

b. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan

Meliputi jadwal pelaksanaan rekrutmen, pengajuan surat rekomendasi beasiswa yang masuk menjadi salah satu persyaratan utama dalam mengajukan beasiswa, dan tata cara pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi beasiswa (berkala);

c. Informasi Kinerja

Meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

2.2. Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP

Implementasi Pelaksanaan kegiatan terkait KIP yang dilaksanakan di Pusbangkom Manajemen antara lain :

2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen secara khusus telah membangun Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen yang terletak di Gedung Pusbangkom Manajemen Lantai 1 sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk keterangan detail akan diuraikan pada subbab 2.5.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.

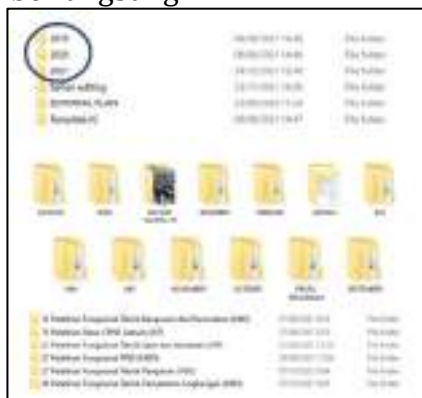
2.2.2. Peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen secara rutin mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka dari itu, peliputan dan pendokumentasian sangat di perlukan guna pelaporan kepada pimpinan dan publikasi. Peliputan dan pendokumentasian meliputi pengambilan foto dan pengumpulan data kegiatan.



Gambar 1- Pendokumentasian Kegiatan Internal Pusbangkom Manajemen

Hasil pendokumentasian diarsipkan secara digital dalam bentuk folder dan diklasifikasikan sesuai tahun, bulan, dan tanggal kegiatan berlangsung.

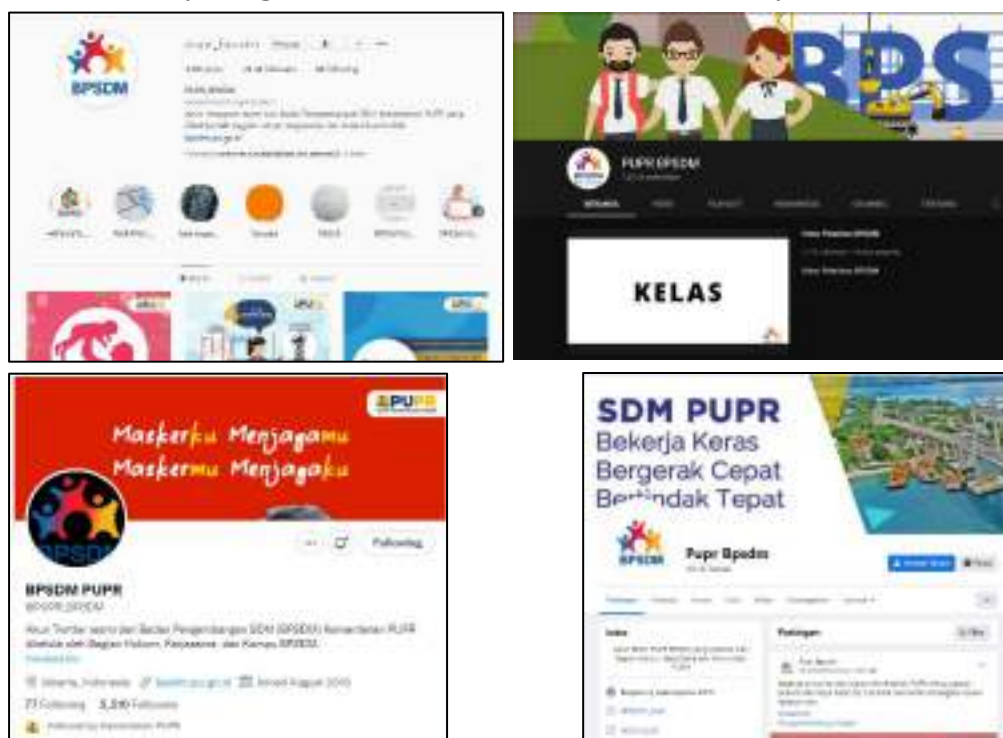


Gambar 2 - Pengarsipan Dokumentasi Kegiatan

2.2.3. Publikasi Produk Pusbangkom Manajemen

Hasil peliputan dan produk-produk Pusbangkom Manajemen biasanya dipublikasikan melalui kanal-kanal media sosial Pusbangkom Manajemen atau media informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik media cetak maupun digital. Namun dengan terbitnya Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor 08/SE/SJ/2021 tentang Pengelolaan Platform Digital di Kementerian PUPR, mengharuskan Pusbangkom Manajemen menutup seluruh media sosial. Sehingga publikasi kegiatan langsung dikirimkan ke PPID Utama di BPSDM. Kanal-kanal yang digunakan, antara lain:

a. Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube)



Gambar 3 – Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Media Sosial BPSDM

b. Website



Gambar 4 - Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Website BPSDM

c. X-Banner



Gambar 5 - Publikasi Informasi melalui X-Banner

d. TV Corner



Gambar 6 - Publikasi di TV Corner

e. InDing (Info Dinding)



Gambar 7 - Publikasi Informasi di Info Dinding

2.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

2.3.1. Jumlah Pemohon Informasi

Sebelumnya, ada beberapa media yang digunakan Pusbangkom Manajemen untuk layanan permohonan informasi, diantaranya melalui Instagram (Kolom komentar dan Direct Message), Aplikasi Instant Messaging (WhatsApp), dan secara langsung di Ruang Layanan Informasi. Namun karena ditutupnya media sosial Pusbangkom Manajemen, saat ini sarana untuk melayani permohonan informasi hanya melalui e-PPID PUPR & BPSDM serta R. Layanan Informasi. Kuantitasnya pun sangat jauh menurun bahkan sama sekali tidak ada. Berikut rinciannya:

a. Pemohon Informasi Secara Langsung

Ruang Layanan Informasi Pusbangkom Manajemen dibuka sejak September 2019 dan telah melayani secara langsung pemohon informasi pada hari dan jam kerja. Jam operasional Ruang Layanan Informasi kami, dari pukul 09.00-11.00 dan 13.00-15.00 WIB. Tetapi, di luar jam tersebut kami tetap melayani permohonan informasi hingga batas waktu jam kerja selesai.

Dikarenakan pandemik COVID-19 maka mobilitas masyarakat pun dibatasi sehingga jumlah pemohon melalui R. Layanan Informasi sangat sedikit.

2.3.2. Persentase Data Pekerjaan Pemohon

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik.

Jumlah permohonan informasi ke Pusbangkom Manajemen mengalami penurunan yang sangat signifikan sejak media sosial terpusat ke PPID Pusat (BPSDM). Sehingga permohonan informasi terpusat pada website BPSDM.

Adanya gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) sejak Juni 2024 mengakibatkan *website* BPSDM tidak bisa diakses. Mengakibatkan Pusbangkom Manajemen tidak bisa menerima permohonan informasi. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait Pusbangkom Manajemen:

a. E-PPID PUPR

Tabel 1 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui e-PPID

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		0	0%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui e-PPID PUPR tidak ada sama sekali.

b. E-PPID BPSDM

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	3	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		3	0%

Tabel 2 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui e-PPID BPSDM

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui e-PPID BPSDM didominasi oleh perseorangan.

c. Ruang Layanan Informasi

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 3 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui R. Layanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa selama periode laporan ini dibuat tidak ada permohonan informasi dari media manapun.

2.3.3. Jumlah Permintaan Informasi

Permintaan informasi di Pusbangkom Manajemen dibagi menjadi beberapa topik informasi, yaitu terkait Pendidikan, Pelatihan, Penugasan Widyaiswara, dan informasi Lain-lain.

a. E-PPID PUPR

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	0%
2.	Pelatihan	0	0%
3.	Penugasan Widyaiswara	0	0%
4.	Jabatan Fungsional	0	0%
5.	Lain-lain	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 4 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID PUPR

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa tidak ada sama sekali melalui e-PPID PUPR.

b. E-PPID BPSDM

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	0%
2.	Pelatihan	0	0%
3.	Penugasan Widyaiswara	0	0%
4.	Jabatan Fungsional	0	0%
5.	Lain-lain	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 5 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID BPSDM

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa tidak ada sama sekali melalui e-PPID BPSDM.

c. Ruang Layanan Informasi

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	0%
2.	Pelatihan	0	0%
3.	Penugasan Widyaiswara	0	0%
4.	Jabatan Fungsional	0	0%
5.	Lain-lain	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 6 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui R. Layanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa selama periode laporan ini dibuat tidak ada permohonan informasi dari media manapun.

2.3.4. Status Pelayanan Informasi

Media	Status	Jumlah	Persentase
e-PPID PUPR	Dipenuhi	0	0%
e-PPID BPSDM		3	100%
R. Layanan Informasi		0	0%

Tabel 7 - Status Pelayanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi, tidak ada permohonan informasi yang masuk.

2.3.5. Rata-rata Waktu Pelayanan

Permohonan informasi publik Pusbangkom Manajemen baik melalui Ruang Layanan Publik, e-PPID PUPR, dan e-PPID BPSDM adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 08.00 s.d. pukul 16.30 WIB.

Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

2.3.6. Informasi/Data yang Diminta Pemohon

Permohonan informasi di Pusbangkom Manajemen biasa nya di dominasi topik lain-lain yang lebih tepat nya mengenai Pelatihan dan Jabatan Fungsional.

2.3.7. Media Permintaan Informasi

Seperti yang sudah di jabarkan sebelumnya, Pusbangkom Manajemen sebelumnya menyediakan beberapa media yang bisa digunakan pemohon, yaitu media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube), Ruang Layanan Informasi, dan Pesan Singkat. Namun, terbitnya SE yang telah dijelaskan sebelumnya mengharuskan Pusbangkom Manajemen menutup semua sosial media sehingga sarana yang tersedia yaitu, Ruang Layanan Informasi, e-PPID PUPR, dan e-PPID BPSDM.

2.3.8. Jumlah Sengketa Informasi

Sampai dengan kurun waktu tahun 2021 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik Pusbangkom Manajemen.

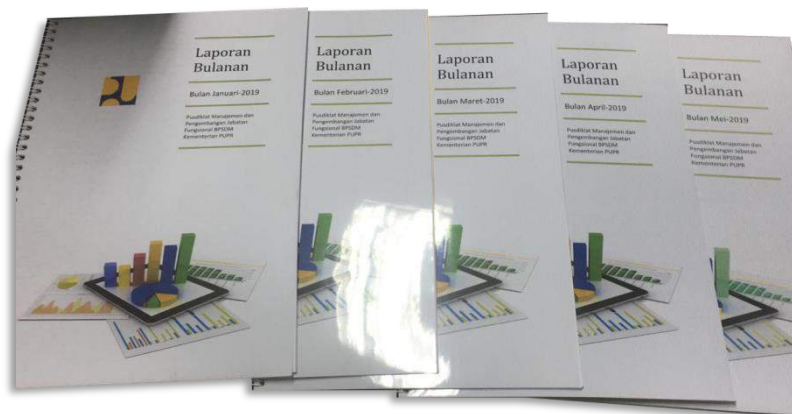
2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

a. Informasi Berkala dan Setiap Saat

Pusbangkom Manajemen menyediakan informasi berkala mengenai Laporan Bulanan terkini, Laporan Kinerja organisasi, Laporan PPID per-Triwulan, Profil Kerja, serta Struktur Organisasi, dan Daftar Pejabat, dll. Informasi-informasi tersebut dipublikasikan melalui Website BPSDM dan PUPR.

1. Laporan Bulanan

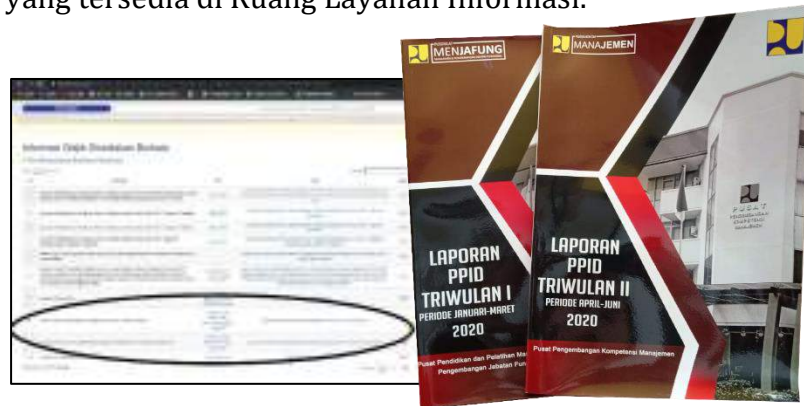
Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen diterbitkan paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya disediakan dan dipubliaksi dalam bentuk digital. Selain dimuat dalam halaman *website* e-SAKIP yang dikelola oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PAKLN), juga dapat di akses di *website* BPSDM halaman PPID BPSDM Daerah.



Gambar 8 - Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen

2. Laporan PPID per-Triwulan

Laporan PPID Pusbangkom Manajemen di disediakan per-Triwulan dan disediakan dalam bentuk digital melalui *website* BPSDM.pu.go.id dan cetak yang tersedia di Ruang Layanan Informasi.



Gambar 9 - Laporan PPID per-Triwulan Pusbangkom Manajemen

3. Laporan Kinerja

Pusbangkom Manajemen menyediakan Laporan Kinerja dalam bentuk digital yang bisa di akses di *website* BPSDM.



Gambar 10 - Laporan Kinerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2024

4. Profil Kerja Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen menyediakan Profil Kerja dalam bentuk digital yang bisa di akses pada:

A. Website BPSDM.



Gambar 11 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

B. YouTube BPSDM



Gambar 12 - Tangkapan Layar YouTube BPSDM

5. Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat

Pusbangkom Manajemen menyediakan Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat dalam bentuk digital yang bisa di akses di *website* BPSDM.



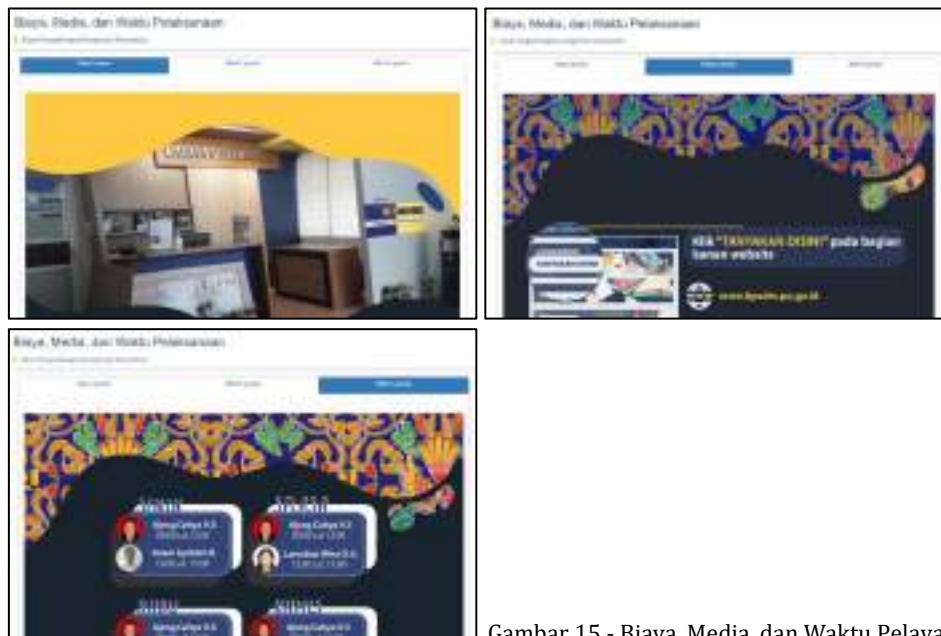
Gambar 13 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

6. Dasar Hukum PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 14 - Dasar Hukum PPID Pusbangkom Manajemen

7. Biaya, Media, dan Waktu Pelayanan



Gambar 15 - Biaya, Media, dan Waktu Pelayanan

8. Produk Hukum Pusbangkom Manajemen

Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat				
Kategori Produk Hukum				
No	Produk	Uraian	Salah	Salah
1	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum
2	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum
3	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum
4	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum
5	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum
6	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum
7	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum
8	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum
9	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum
10	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum	Produk Hukum

Gambar 16 - Produk Hukum Pusbangkom Manajemen

9. Profil Pelatihan dan Struktur Pusbangkom Manajemen

Informasi Wajib Disediakan Berkala

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Filter: 12/12/2024 Search: 1234

No	Deskripsi	File	Link	Tahun
10	Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	STRUKTUR PUSAT 1.jpg	Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	2021
20	Profil Pelatihan Bidang Manajemen	Profil Pelatihan Bidang Manajemen 2020.pdf	Profil Pelatihan Bidang Manajemen	2020

Showing 1 to 2 of 2 records (Sorted from 22 total records)

Previous Next

Gambar 17 - Profil Pelatihan dan Struktur Pusbangkom Manajemen

10. Surat Keputusan PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 18 - SK PPID Pusbangkom Manajemen

11. Standard Operation Procedure (SOP) PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 19 - SOP PPID

12. Struktur PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 20 - Struktur PPID Pusbangkom Manajemen

13. Tugas dan Fungsi PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 21 - Tugas dan Fungsi PPID Pusbangkom Manajemen

14. Profil Singkat PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 22 - Profil Singkat PPID Pusbangkom Manajemen

15. Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen

Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat				
Pusat Pengendalian Kompetensi Manajemen				
No	Indikator	File	Link	Tahun
1.	Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen	Indikator kompetensi petugas PPID Pusbangkom Manajemen.pdf	Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen	2020

Gambar 23 - Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen

16. Maklumat Layanan PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 24 - Maklumat Layanan PPID Pusbangkom Manajemen

17. Mekanisme Pelayanan PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 25 - Mekanisme Pelayanan PPID Pusbangkom Manajemen

18. Jadwal Petugas Layanan Informasi



Gambar 26 - Jadwal Petugas Layanan Informasi

19. Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi



Gambar 27 - Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi

20. Jadwal Kepala Pusat per-Tahun

Pada *website* BPSDM terdapat Jadwal Kepala Pusat per-Tahun secara digital.

A screenshot of a web browser displaying a digital schedule. The page has a dark sidebar on the left with several menu items. The main content area shows a table with multiple columns and rows, containing text and numbers, which appears to be a calendar or schedule for a specific year.

Gambar 28 - Jadwal Kepala Pusat Pusbangkom Manajemen

21. Capaian Pelatihan Tahun 2020

Pusbangkom Manajemen menyediakan data mengenai Capaian Pelatihan Tahun 2020 secara digital di TV Corner dalam Ruangan Layanan Informasi.



Gambar 29 - Capaian Pelatihan Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

b. Informasi Serta Merta

Saat ini, Pusbangkom Manajemen menyediakan informasi serta merta terkait penanggulangan bencana pandemik COVID-19.



Gambar 30 - Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi, dan Profil Pelatihan Bidang Manajemen Tahun 2019

2.5. Kondisi Layanan Informasi Publik

Kondisi layanan informasi publik di Pusbangkom Manajemen meliputi informasi jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan

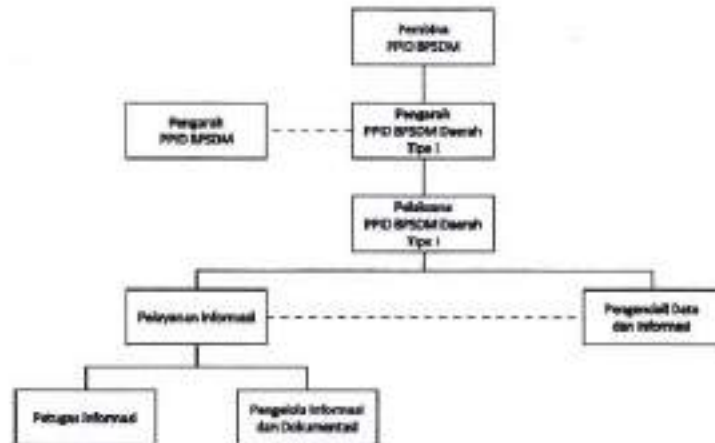
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84//KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang saat disusunnya laporan ini telah berubah nomenklatur menjadi Pusbangkom Manajemen sebagai PPID Daerah Tipe I yang menyelenggarakan layanan informasi publik secara mandiri, maka dibuatlah organisasi PPID untuk mewujudkan layanan informasi yang memadai.

Pembentukan organisasi PPID dimulai dengan menerbitkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 105/KPTS/MF/2019 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian PUPR. Setelah pergantian nomenklatur struktur organisasi internal Pusbangkom Manajemen juga mengalami perubahan. Untuk itu, diterbitkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 84/KPTS/KM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 56//KPTS/KM/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penerapan Mekanisme Kerja Baru Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Kementerian PUPR yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 20/SE/M/2023 menyebabkan perubahan nama bagian-bagian dalam Pusbangkom Manajemen. Sehingga diterbitkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 39/KPTS/KM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84/KPTS/KM/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.5.1. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Menurut Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84//KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sebagai PPID Daerah Tipe I adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPIE)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH TINGKAT I**



STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN

PENGARAH PPD BPSDM DAERAH TPE I
Ir. Moch. Adam, MM
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

PELAYANAN INFORMASI
Muhammad Arsyad, S.E.
Tim Bangsam Bidang Teknologi
Pembelajaran dan Informasi

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Steven Mulyadi, S.Sn
2. Adestyia Bismandoko HP, S.E
3. M. Riza Firmansyah, S.Pd

Adestyas Bismandoko Haryantono Putra, SE., NAK., CSRS

Tim Bangkom Bidang Manajemen Konstruksi dan
Sertifikasi Kompetensi
M.Fakhrur Rachman, ST, MT

Tim Bandung, Manajemen Kepemimpinan
Sund, S. ST., MM

Tin Bangkoin Bidang Manajemen Fungsional dan
Sertifikasi
Drs. Hery Wardoyo, M.Kom

Tim Penelitian, Evaluasi dan Pelaporan
Dra. Sri Musri Ambarukmi, M.T.

Tim Psikologgessan Kerjasama dan Manajemen Risiko
Eka Setiawan, S.IP., MA., MPA

Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Manajemen,

Ir. Moeh. Adam, MM
NIP. 196503031993031002

Gambar 31 - Struktur Organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sesuai SK 39/KPTS/MF/2024

Pelaksana PPID Pusbangkom Manajemen dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana Informasi dan 7 (tujuh) orang Pejabat Pengendali Data dan Informasi. Terdapat 1 (satu) orang Pelayan Informasi dan 3 (tiga) Petugas Informasi serta 3 (tiga) orang Pengelola Informasi dan Dokumentasi.s

2.5.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan informasi publik yang memadai, Pusbangkom Manajemen menyediakan beberapa saran dan prasarana yang digunakan, diantaranya:

a. Ruang Layanan Informasi

Ruang Layanan Informasi Pusbangkom Manajemen terdapat di Gedung Pusbangkom Manajemen Lt. 1 dengan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pemohon informasi. Letak nya yang strategis di dekat pintu masuk Gedung Pusbangkom Manajemen juga muda untuk diakses pemohon informasi.



Gambar 32 - Ruang Layanan Informasi Publik

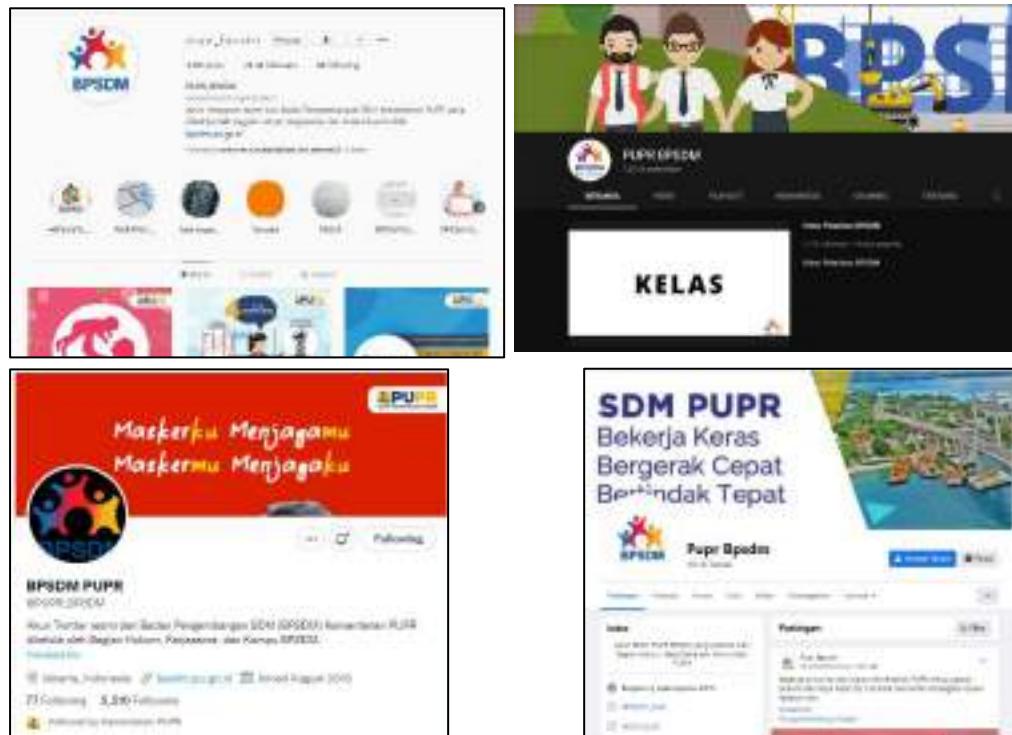


Gambar 33 - Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik

b. Media Sosial

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa semua media sosial Pusbangkom Manajemen telah ditutup. Sehingga semua kegiatan publikasi melalui media sosial dialihkan ke media sosial BPSDM sebagai PPID Utama.

Informasi mengenai kebijakan, pelatihan, pendidikan, dan pencapaian kinerja Pusbangkom Manajemen di publikasikan melalui media sosial tersebut. Berikut tampilan media sosial BPSDM:



Gambar 34 - Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Sosial

c. TV Corner

Untuk memberikan informasi secara menghibur dan inovatif, Pusbangkom Manajemen menyediakan media berupa TV di Ruang Layanan Informasi dan ruang tunggu di lobby yang menayangkan materi profil, capaian kinerja, jadwal pelatihan, bahan tayang mengenai jurnal infrastruktur, pengetahuan mengenai DUPAK, dll.



Gambar 35 - TV Corner

d. InDing (Info Dinding)

Berlokasi di dekat ruang tunggu lantai 1 Gedung Pusbangkom Manajemen, Info Dinding merupakan salah satu media yang disediakan untuk informasi Pusbangkom Manajemen dalam bentuk poster.



Gambar 36 - Info Dinding

e. X-Banner

Untuk menambah media publikasi informasi, Pusbangkom Manajemen juga menyediakan beberapa X-Banner yang berlokasi di Ruang Layanan Informasi, di samping meja resepsionis, dan disamping lift.



Gambar 37 - X-Banner

c. Alat Dokumentasi



Gambar 38 - Alat Dokumentasi

2.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

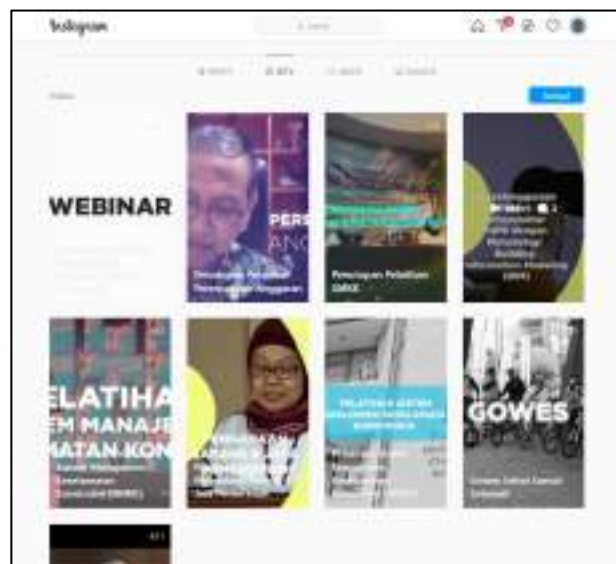
Pusbangkom Manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga melakukan upaya pengembangan inovasi. Hal ini diharapkan selain dapat mempermudah penyampaian informasi juga untuk menarik minat publik untuk mengakses informasi tersebut. Salah satu inovasi dalam bidang pelayanan publik yang dilakukan guna menambah variasi penyampaian informasi adalah melalui video animasi.

1. Mengemas Informasi dalam Bentuk Audio-Visual

Pusbangkom Manajemen berusaha mengemas informasi ke dalam video animasi ataupun dokumentasi dalam bentuk video yang menarik dan dilengkapi dengan Voice Over ataupun Caption sehingga mudah di mengerti.



Gambar 39 - Video Animasi Mengenai Jurnal Infrastruktur



Gambar 40 - Video Dokumentasi Kegiatan & Pelatihan

2. Memanfaatkan media daring lebih optimal

Dalam masa pandemi, pelayanan dan penyebaran informasi secara daring menjadi salah satu cara yang populer. Pusbangkom Manajemen berkoordinasi dengan BPSDM untuk mempublikasikan informasi di media daring BPSDM.

a. Melengkapi Dokumen Terkait Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Wajib Disediakan Secara Rutin

No	Indikator	Nilai	Nilai	Nilai
1	Informasi wajib disediakan secara rutin	100	100	100
2	Informasi wajib disediakan secara rutin	100	100	100
3	Informasi wajib disediakan secara rutin	100	100	100
4	Informasi wajib disediakan secara rutin	100	100	100
5	Informasi wajib disediakan secara rutin	100	100	100
6	Informasi wajib disediakan secara rutin	100	100	100
7	Informasi wajib disediakan secara rutin	100	100	100
8	Informasi wajib disediakan secara rutin	100	100	100
9	Informasi wajib disediakan secara rutin	100	100	100
10	Informasi wajib disediakan secara rutin	100	100	100

Informasi Wajib Serta Merta

1. Informasi wajib disediakan secara rutin

2. Informasi wajib disediakan secara rutin

3. Informasi wajib disediakan secara rutin

4. Informasi wajib disediakan secara rutin

5. Informasi wajib disediakan secara rutin

6. Informasi wajib disediakan secara rutin

7. Informasi wajib disediakan secara rutin

8. Informasi wajib disediakan secara rutin

9. Informasi wajib disediakan secara rutin

10. Informasi wajib disediakan secara rutin

Profil PPID

- Profil Singkat
- Dasar Hukum
- Tugas dan Fungsi
- Struktur Organisasi

Standar Layanan

- Visi, Misi, dan Motto Pelayanan
- Maklumat Layanan
- Biaya, Media, dan Waktu Pelaksanaan
- SK PPID BPSDM
- Mekanisme Layanan Informasi
- Pelugas Layanan
- SOP
- Hasil Survey Kepuasan

Laporan Pelaksanaan

1. Laporan Pelaksanaan Informasi Publik

2. Laporan Pelaksanaan Informasi Publik

3. Laporan Pelaksanaan Informasi Publik

4. Laporan Pelaksanaan Informasi Publik

5. Laporan Pelaksanaan Informasi Publik

6. Laporan Pelaksanaan Informasi Publik

7. Laporan Pelaksanaan Informasi Publik

8. Laporan Pelaksanaan Informasi Publik

9. Laporan Pelaksanaan Informasi Publik

10. Laporan Pelaksanaan Informasi Publik

Gambar 41 - Tab Informasi Publik di website BPSDM

b. Berkontribusi dengan Menulis Beberapa Draft Berita di website BPSDM

MINIMALISIR MASALAH PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN KONSTRUKSI, BPSDM ADAKAN PELATIHAN ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI

04 Oktober 2024 - 08:00 WIB - 08:00 WIB

Medan, 3 Oktober 2024 – Untuk meminimalisir masalah yang timbul saat penyelenggaraan pembiayaan konstruksi dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dan cerdas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mengahutusnya melalui Pelatihan Estimas Biaya Konstruksi di Medan, Kamis (3/10), secara tatap muka dan daring.

"ASN Bidang PUPR saat ini banyak cerdas, dalam melakukan proses-proses yang meliputi pengikutan Harga Satuan Dasar Upah, Kargo Satuan Dasar Asat, dan Harga Satuan Dasar. Untuk kelengkapan akan menghasilkan Harga Satuan Pokok (PSP) yang akurat, integritas yang lebih diutamakan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi," ujar Ahmad Kholid Nasution, Kepala Bala Pengembangan Kompetensi, Manajemen Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan.

Dua minggu ke depan, kebutuhan informasi, pembongkaran dan harga lebih detail dan akurat. Tidak terkecuali dalam sektor pembangunan perumahan. Proses pembongkaran-pembongkaran konkritnya harus dilakukan dengan cerdas dan lebih. Maka sekiranya 35 orang peserta akan mengikuti 14 jam Pelatihan Pengembangan secara daring hingga 13 Oktober, sedangkan tatap muka pada 14 dan 15 Oktober.

Menutup pembicara akan membuka sesi diskusi, Kholid menyampaikan harapannya kepada para peserta agar mengikuti pelatihan secara aktif serta menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari para pengajar yang berasal dari Pejabat Struktural dan Fungsional Kementerian PUPR.

Materi pelatihan yang akan diberikan yaitu: Core Value BPSDM, Integrasi, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pekerjaan, Pengembangan Diri dan Organisasi, Dasar Manajemen Risiko, Kebijakan Teknik Estimas Biaya Konstruksi, Penilaian Biaya Langsung dan Tidak Langsung, Analisis Biaya Sistem Manajemen Manajemen Konstruksi (SMK), Gambar, Spesifikasi Teknik, dan Bill of Quantity (BoQ), Analisis Harga Satuan Dasar, Analisis Realisasi Analisis Harga Satuan Pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Studi Kasus dan Seminar.

16 October 2024 / 09:02 AM EST / 10/16/2024 9:02 AM

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

Manajemen Strategik meliputi aspek suatu proses perusahaan: pengorganisasian, pengalokasian, dan pengendalian semua aspek yang terkait dalam

Reformasi ini menggunakan RoboBuddy Learning sebagai 3D dan Response (PS, 21) antara pelatihan merupakan KPI d. kegiatan kerentanan

33 PESERTA LULUS PELATIHAN ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI DI

Samuelson, P. 1995. *Real Business Cycles*. Cambridge, MA: MIT Press.

berikut ini: "Terdapat 100 orang yang telah meninggal dunia akibat penyakit ini, dan 100 orang yang telah meninggal dunia akibat penyakit ini." (The New York Times, 2005)

Samudra 10 km di Rappahannock River (Lampung) dengan terdapat aktivitas industri (Industri Kelapa Sawit), pertambangan (batu bara), perikanan (juga kolam ikan) dan

Kami tetap berharap yang telah kita dapat merupakan sebuah tujuan pribadi ini, yaitu mampu melakukan pekerjaan yang penting

peserta sebanyak 53 orang yang berasal dari 45% PUUK dan 55% dari ELL, di mana terdapat 1 orang high level athlete dan 52 orang low level athlete.

29 PESERTA LULUS PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DI

Table 73 (Continued) 2012 - Selected countries, continued (continued)

Yehonatan Litman, Ph.D., Ph.D., Jonathan Green

original

doi:10.1002/for.1241 Jurnal Psikologi Eksperimental: Jurnal Ilmiah Psikologi

KEPALA BPSDM : KUNCI KEBERHASILAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RESIKO ADALAH KOMPETENSI DAN KOMITMEN BERSAMA

22 Oktober 2024 / BPSDM Kementerian RI 48 111

Jakarta, 22 Oktober 2024 - BPSDM-PURK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan 16 Mekanisme PURK Nomor 15/StrM.0002 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada 22 Oktober 2024 secara daring.

Kementerian PURK telah berkolaborasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance (GCG)) menggunakan kapabilitas utamanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) dan penerapan Manajemen Risiko.

Sebagai langkah untuk meningkatkan SPI, Manajemen Risiko, dan sistem tata kelola lainnya seperti SAP, PPK, SIM, dan SIAP dapat dilakukan melalui Model Tiga Lin. Peningkatan tata kelola ini sejalan untuk memberikan dampak positif bagi organisasi sehingga pemahaman dan komitmen tidak sekadar administratif tetapi mencakup tindakan.

Kapala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Duta Besar RI untuk Inggris mengatakan, "Sebagai pemilik risiko T-1, saya bertanggung jawab atas penerapan SPI dan Manajemen Risiko di BPSDM yang telah mencapai level 3 dan akan dengan nilai T-1T dan berharap agar tahun 2025 bisa dapat mencapai level 4."

"Kunci keberhasilan pelaksanaan MR dan sistem tata kelola lainnya diantaranya adalah kompetensi dan komitmen bersama yang akan kita bangun melalui kegiatan ini. Saya berharap agar kegiatan dapat dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh peserta dengan penuh bakat. Saya mohon kerjasama dan partisipasi aktif dari para peserta sehingga agar pelaksanaan tugas kita mencapai output yang diharapkan, memenuhi akuntabilitas kinerja dan akan menghasilkan kontribusi signifikan" lanjut Duta Besar.

Selanjutnya ini akan membantu membangun metode persiapan, akan ada monitoring dan evaluasi secara daring melalui aplikasi Zoom. Dalam dan 300 peserta dari 18 unit kerja yang melibatkan pejabat dan pejabat dari 18 unit kerja di BPSDM yang merupakan penanggung jawab pengendalian risiko serta anggota kelompok kerja dan masing-masing LPT Baris.

DUKUNG KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR, BPSDM SELENGGARAKAN PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

22 Oktober 2024 / BPSDM Kementerian RI 48 111

Jakarta, 22 Oktober 2024 - Indonesia telah melakukan reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diarahkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc, kini menjadi menjadi tugas yang strategis dengan melibatkan penyedia barang/jasa yang profesional dan pemerintah, PPK, PPK, maupun pejabat pengadaan yang bertanggung jawab penting keberadaannya, sehingga perlu dikembangkan kompetensi PJP level-1 hingga level-4.

Melalui dan itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi PJP Level-1, Level-2 (D/12). Pelatihan ini dilaksanakan agar peserta mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan PJP, sehingga kegiatan pelatihan ini adalah agar peserta mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi standar nasional kompetensi, secara efisien dan efektif.

Selanjutnya Duta Besar RI untuk Inggris mengatakan, "Sebagai Kepala, penerapan PJP ini adalah pelayanan yang akan berdampak luas dan sangat menentukan kinerja infrastruktur kita sebagai PPK. Saya mengucapkan terima kasih BPSDM yang memiliki kompetensi dan PJP untuk standar kompetensi yang dipersyaratkan dari perlu identifikasi sebagai hasil pengadaan kompetensinya, ini akan sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas secara lebih profesional."

"RCM yang cerdas mampu bekerja secara holistik, efektif, efisien, berkolaborasi, dan tidak hanya menunggu perintah pimpinan. Penilaian kompetensi ini harus diintegrasikan dengan sistem, sehingga SDM PJP yang cerdas akan berdampak signifikan menjadi kunci keberhasilan kita menyelenggarakan infrastruktur bangsa PJP" ungkap Duta Besar. Lebih lanjut Duta Besar mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh infrastruktur yang telah dapat melakukan kegiatan ini, sehingga kompetensi dan profesionalitas SDM yang akan dapat terjaga.

33 PESERTA PELATIHAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI BAPEKOM PUPR WILAYAH IX JAYAPURA

22 Oktober 2024 / BPSDM Kementerian RI 48 111

Jayapura, 22 Oktober 2024 - Laporan keuangan harus disusun tepat waktu, akurat, dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka diperlukan Standar Sistem Akuntansi (SSA) yang kompeten dalam bidang tersebut. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Jayapura, Timor (D/12) guna meningkatkan.

Suatu membuat pelatihan secara resmi, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan, akan menyelenggarakan "Pelatihan keuangan di tingkat perantara sebagai dasar penilaian akuntabilitas dan kinerja serta penyelenggaraan standar tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan."

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan negara dan akan sangat penting untuk mendukung kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Berkontribusi dalam ekonomi dengan peran penting, keberlanjutan, efisiensi, berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan lingkungan, kemanusiaan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan keadilan ekonomi nasional.

Pengelolaan keuangan dalam Kementerian/Lembaga terdiri dari suatu proses siklus yang meliputi perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan ini harus dilaksanakan secara sistematis karena akan sangat penting untuk dapat mencapai 30% target penganggaran (WTR) oleh Badan Pengelola Keuangan (BPK).

Selama 8 hari pelatihan, 33 orang peserta akan mengikuti pelatihan secara daring mulai 1 November dan secara tatap muka pada 4 s.d 6 November. Diharapkan setelah selesai pelatihan 32 dan mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat memiliki kompetensi terkait penyusunan laporan keuangan secara yang akurat dan komprehensif.

BPSDM MELATIH 28 ASN AGAR PAHAM REGULASI DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

30 November 2023 / 012023 Kementerian PUPR 481

Bandung, 30 November 2023 – Kementerian Konstruksi dapat menjadi titik setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupaya meningkatkan SDM yang mendasar kompetensi dasar dan kompetensi yang dipertajam. Melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Puskom) Manajemen, BPSDM mengadakan Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) tingkat Ahli Madya Keselamatan Konstruksi di Bandung, Serie (A71), secara tatap muka dan daring.

Kapala Pusbangkes Manajemen, Mohd. Adam, saat membuka pelatihan menyampaikan, "Pelatihan ini dirancang secara khusus bagi setiap ASN PU agar mampu memahami regulasi dan penerapan teknis serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam rangka upaya pengkayaan dan inovasi."

Ahli Madya Keselamatan Konstruksi, dituntut untuk mampu mengelola dan mengelola penerapan SMKK pada proyek infrastruktur yang dibangun sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Daya Nasional Indonesia (SKDN) Nomor 90 Tahun 2022.

Sebanyak 28 peserta akan mengikuti pelatihan ini hingga 13 November mendatang. Para peserta akan menjalani 81 jam Pelatihan (JP) Pelatihan ini akan berlangsung secara daring hingga 6 November 2024 mendatang. Selanjutnya secara tatap muka pada T1 dan T2 12 November 2024.

39 PESERTA LULUS PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

01 Oktober 2024 / 012024 Kementerian PUPR 481

Makassar, 01 Oktober 2024 – BPSDM PUPR melalui Badan Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung telah resmi menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang dibuka di Makara pada 01 Oktober 2024.

Pelatihan ini mengedukasi persiapan nilai-nilai Aka Ota, di mana Sumber Daya Manusia (SDM) ASN diharapkan mendukung peran vital dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. SDM ASN tidak hanya sebagai eksekutif, tetapi juga merupakan model utama untuk mendukung kinerja dalam mencapai visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II ini berfungsi sebagai arena untuk meniadakan konflik dalam kepemimpinan strategis pada jabatan Tinggi Pratama (Tingkat II), yang diharapkan mampu membawa perubahan dalam institusi masing-masing.

Kapala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU, Dediang Rukmana, mengatakan, "Saya diminta untuk memastikan 3 peserta terbaik dalam WNI 4, itu berarti saya bekerja keras untuk memastikan bahwa semua point peserta target 500 atau satu sama lain agar lagi mengikuti. Tahun 2 sangat erat kaitannya."

Dediang Rukmana melanjutkan, "Tapi 1 yang saya yakin yaitu semua kerja keras para peserta target 500 dan saya yakin semua peserta ingin mengikuti program yang bisa bermanfaat bagi masyarakat."

Dr. Ir. Wido Wido Wido, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Kebijakan Negeri (BKK) LBB RI menyampaikan, "Saya ingin menggapai kita semua membangun Aka Ota yang berkeadilan oleh Presiden Prabowo. Dengan itu kita bukan sekedar kata-kata, tetapi merupakan tindakan yang benar kita lakukan dalam setiap aspek kepemimpinan kita." Ia juga menambahkan, "Harapan saya, kita semua bisa melakukan sesuatu dan menerapkan strategi yang kompetitif, profesional, inovatif, berintegritas, dan melayani. Selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ini dengan baik."

BPSDM MUTAKHIRKAN INSTRUMEN EVALUASI PASCA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

01 Oktober 2024 / 012024 Kementerian PUPR 481

Bandung, 30 Oktober 2023 – Jaga setiap Openness (JOP) merupakan bagian dari kompetensi yang baik, kompetensinya harus selalu mengikuti. Setiap satu orang yang diberikan penguasaan pelatihan. Sebagai salah satu sarana pengembangan kompetensi, pelatihan harus ditinjau dan optimalisasi nya melalui proses evaluasi dengan instrumen yang relevan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkes) Manajemen mengembangkan Penyusunan Instrumen Evaluasi Instrumen Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi pada Tahun (2023) di Bandung.

Prof. Dr. Haryono, MPA, dari Universitas Negeri Semarang, sebagai Narasumber menyampaikan, "Untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel itu langkah yang dilakukan adalah menentukan pokok indikator dan apa yang kita lakukan. Dalam hal ini seperti yang ada di dalam 13 BPSDM Surat Tahun Kepala BPSDM Nomor 4 Tahun 2022 itu. Dari indikator ditetapkan menjadi sub-sub indikator seperti itu diintegrasikan menjadi butir-butir instrumen. Kalau sudah ada instrumen secara validitas sudah bisa digunakan."

Dari menghasilkan instrumen yang sesuai dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan semua model evaluasi (Kirkpatrick) tetap digunakan. Model Kirkpatrick merupakan model evaluasi yang sudah menjadi best practice di berbagai organisasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam model tersebut terdapat 4 level yaitu Reaksi, Pembelajaran, Perilaku, dan Hasil.

Selain itu, diketahui waktu dan target kinerja yang jelas serta terukur diperlukan untuk menilai dampak pelatihan (tingkat pengingkatan atau tidak). Pusbangkes Manajemen dengan mengolah masukan dari para narasumber dan pemakliran dari berbagai unit kerja menghasilkan instrumen evaluasi pra-pengembangan kompetensi. Sehingga pengukur dampak sebelum dan sesudah ASN mengikuti pengembangan kompetensi akan lebih akurat.

"Instrumen ini tidak di uji coba lagi dapat terdapat manfaatnya sehingga bisa mendapat input bisa diperbaiki," ujar Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pusbangkes Manajemen Pusbangkes Manajemen Pusbangkes Manajemen Pusbangkes Manajemen.

BPSDM MELATIH 259 PESERTA AGAR PAHAM PERENCANAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI DESIGN & BUILD

07 November 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 144 114

Tuntutan profesional sebagai tenaga ahli bidang ASN-Sekeloa, yaitu mengembangkan. Sesuai UU No. 28 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), semua setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. BPSDM menyelenggarakan Webinar berjudul "Perencanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design & Build)" yang dibuka pada Kamis (7/11/24).

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Markas Utama Komando "Saya berharap webinar ini dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi kita semua dalam memahami perencanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (Design & Build). Oleh karena itu, sebagai informasi ini adalah sebagai salah satu bentuk pengembangan kompetensi bagi para ASN bidang Pelaksana Umum."

"Metode Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (Design & Build) dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya sehingga menghasilkan ancas pembangunan infrastruktur, dibandingkan dengan metode konvensional seperti Design-Bid-Build. Namun demikian, harus memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah seperti standar pelaksanaan konstruksi," tambah Markas Utama.

Regulasi ini dilaksanakan secara 1 hari pada Kamis (7 November 2024) dengan total peserta 259 orang yang berasal dari ASN Kementerian PUPR dan ASN Kementerian Dalam.

HADIRKAN SEKRETARIS PROFESIONAL, BPSDM MELATIH 27 PEGAWAI PADA PELATIHAN KESEKRETARIATAN

08 November 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 144 114

Akhir, 8 November 2024 – Tanggung jawab seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang sangat vital. Untuk itu, diperlukan seorang sekretaris yang dapat membantu pimpinan dalam menjalankan tugas dan meningkatkan produktivitas kerja. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya meningkatkan kompetensi para sekretaris melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya. Pelatihan Kelembagaan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dilaksanakan secara tatap muka di Jakarta pada Rabu (6/11/24).

"Banyak kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris yang profesional. Dalam pelatihan ini ada 7 kemampuan dasar: Kemampuan administratif, komunikasi verbal, team work, problem-solving, kemampuan strategi dan diplomasi, kemampuan korespondensi, serta kemampuan analisis. Untuk Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusat Pengembangan), Manajemen diwakili Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Purnomo Komara Hermana Kusumadewi saat membuka pelatihan.

Pada 6 November mendatang, 27 orang sekretaris akan mengikuti pelatihan selama 30 jam pelajaran (JP). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktu, mengembangkan kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal, menguasai teknologi dan alat bantu kerja modern, serta memperkenalkan para sekretaris untuk mengatasi tantangan dalam lingkungan kerja.

Pemenuhan sekretaris penting terhadap organisasi dan besarnya kemampuan yang harus dimiliki mendukung. Penguasaan Manajemen untuk bekerjasama dengan Atasan, Sekretaris dan Manajemen Masudirni (KSM). Sebagai penyelenggara, Badan Pengembangan Kompetensi PU Wilayah II Akademi pun berkomitmen untuk memfasilitasi seluruh kegiatan belajar mengajar pada pelatihan ini.

UNA HASILKAN SDM TANGGUH DAN PROFESIONAL, BPSDM SELenggarakan PELATIHAN PBJ LEVEL 1

04 November 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 144 114

Melalui 04 November 2024 – BPSDM PUPR melalui Badan Pengembangan Kompetensi Wilayah VII Makassar telah membuka Pelatihan Peningkatan Berprestasi Pemimpin Level 1 pada 4 November 2024 di Makassar.

Tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia, Kementerian PUPR menekankan pentingnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan. Menurut pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Karya, Budiman, selanjutnya pembangunan tidak hanya terletak pada bangunan fisik yang megah, tetapi juga pada ketangguhan dan profesionalisme SDM PUPR.

Budiman menjelaskan bahwa sesuai dengan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus memenuhi standar yang ketat, guna menghasilkan pekerjaan yang handal dan bermutu. "ASN Bidang PUPR harus memiliki kompetensi yang tinggi, dan perlu sertifikasi untuk menunjukkan penguasaan bidangnya," tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian PUPR menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM. Budiman berharap peserta dapat aktif dan fokus dalam mengikuti pelatihan yang berlangsung, ia menjelaskan, "kami berharap proses ini akan dapat meningkatkan angka 95%."

Dengan dibarternya peserta dalam pelatihan ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan profesionalisme dan kontribusi mereka dalam pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 04 s.d. 22 November 2024. Pelatihan ini menggunakan metode Blended Learning dengan total 80 jam Pelajaran (JP). Peserta dari 13 peserta terdiri dari 25 orang dari Bapokor VII Makassar dan 38 orang dari Bapokor Wilayah II Akademi berasal dari Unit Kerja di Lingkungan Bina Direktorat Jenderal Bina Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

31 PEJABAT INTI SATUAN KERJA (PISK) BPSDM IKUTI PELATIHAN PENGELOLA ANGGARAN

28 November 2024 / BPSDM Kementerian PURI 44/11

Banding, 25 November 2024 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU melalui Balai Pengembangan Kompetensi (Basecomp) PgRR Wilayah IV Bandung membuka Kegiatan Pelatihan Pengelola Anggaran bagi Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) di lingkungan BPSDM pada 25 November 2024 di Bandung.

Tujuan dengan amaran Dasar 23, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab dan secara-luasnya dilaksanakan rakyat. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia (SDM) yang handal menjadi salah satu dalam memastikan tata kelola APBN yang akuntabel di setiap Kementerian dan Lembaga termasuk di Kementerian PU.

Pejabat Pendidik Kontinuitas (PK) dan Pejabat Revitalisasi Sumber Peneliti Manikuler (PRSM) merupakan peran strategis sebagai bagian dari Raster Pengembangan Raster II tingkat Satuan Kerja. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa siklus belanja negara sesuai dengan perencanaan pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan Peraturan Revolusi Nomor 20 Tahun 2018 dibutuhkan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan kompetensi dan profesionalisme dari Kuasa Rencana Anggaran (KRA), PK, dan PRSM. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan menjadi langkah penting yang harus terus dilakukan.

36 PESERTA LULUS PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA

30 November 2024 / BPSDM Kementerian PURI 44/12

Kabassar, 25 November 2024 – Setelah menjalani 15 hari pelatihan dan sertifikasi kompetensi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level II sebanyak 36 orang peserta dinyatakan lulus. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengadakan pelatihan ini sejak 8 November 2024 di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VII Makassar.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PJSP) harus bersifat inklusif. Sehingga dapat memperhatikan Value for Money. Selain itu, PU juga harus bisa meningkatkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyedia, manufaktur, pedagang, serta mendorong pengusahan produk dalam negeri. Sehingga dapat diterima dapat mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kompetensi dan integritas dan keahlian Pejabat Pendidik Kontinuitas (PK), Keraspasi Kaja (PKK), maupun Pejabat Pengadaan sangat penting. Sehingga dapat hanya kompetensi PKP pada level 1, harusnya PKP pada level 2, 3, dan 4, sesuai dengan kompleksitas pekerjaan yang dihadapi.

Sertifikasi PK Level 1 ini menjadi salah satu persyaratan jabatan tersebut sebagai modal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang PU secara profesional. Untuk Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Manajemen diarahkan Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Tatalaksana, dan/atau Manajemen Sistem.

HASIL EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN SEMESTER II DINILAI SANGAT BAIK, PSDM LAKUKAN LOKAKARYA EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN SEMESTER II DAN EVALUASI PASCA PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN

20 Desember 2024 / BPSDM Kementerian PURI 44/13

Banding, 9 Desember 2024 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen menggelar Lokakarya Evaluasi Penyelenggaraan kompetensi Manajemen Semester II dan Evaluasi Pasca Pengembangan kompetensi Manajemen, yang dilaksanakan pada Kamis, 20/12/24 di Bandung.

Salah membuka kegiatan, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Mohd. Adam menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah berkembang berbagai jenis UMKM akan tetapi masih banyak yang masih mengalami kesulitan bagi keberlanjutan penduduk di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Kementerian PU sebagai leading sector pembangunan infrastruktur, membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan jujur yang merupakan salah satu aspek penting kompetensi. Hasil dari evaluasi ini akan terus menerus guna meningkatkan kualitasnya sehingga dapat meningkatkan SDM yang handal dan kompeten.

"Pengembangan SDM dapat menjadi tindakan penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, serta dalam memenuhi standar PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, dan PP Nomor 40 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan sikap PNS memiliki hak untuk pengembangan kompetensi minimal 25 JP/tahun, dan Maksimal 54 JP/tahun bagi PNS yang Aspek."

Adam juga menyampaikan bahwa guna memenuhi hal tersebut, BPSDM Kementerian PURI juga telah mengembangkan berbagai pola pelatihan berbasis teknologi informasi. Di antaranya pola Diklat, Learning, Workshop, dan/atau Learning, Full e-Learning, dan Hybrid Learning. Hal ini merupakan model BPSDM dalam mempercepat Revolusi Industri 4.0 dan Era Society 5.0.

BPSDM MELULUSKAN 31 PEMIMPIN TRANSFORMASIONAL DALAM INOVASI DAN ADAPTASI

22 November 2024 / BPSDM Kementerian-PUPR 44/25

Surabaya, 21 November 2024 - Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya menyelenggarakan penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang telah berlangsung sejak 22 Juli 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung efektivitas pelayanan publik.

Peserta pelatihan terdiri dari 31 orang ASN yang telah mengikuti seluruh materi pelatihan. Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin transformasional. Materi tersebut meliputi konsep kepemimpinan transformasional, strategi manajemen perubahan, dan keterampilan komunikasi yang efektif.

Salah satu hasil dari pelatihan ini adalah penguasaan konsep manajemen perubahan yang efektif. Peserta juga mendapatkan wawasan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional dalam konteks organisasi mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Acara ini menjadi momentum penting bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam meningkatkan kapasitas ASN. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan.

BPSDM LAKUKAN KONSOLIDASI RENCANA PELATIHAN BIDANG MANAJEMEN TAHUN 2025

18 Desember 2024 / BPSDM Kementerian-PUPR 44/26

Bekasi, 18 Desember 2024 - Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya menyelenggarakan konsolidasi rencana pelatihan bidang manajemen tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh 31 orang ASN yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya.

Salah satu hasil dari kegiatan ini adalah penguasaan konsep manajemen yang efektif. Peserta juga mendapatkan wawasan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen transformasional dalam konteks organisasi mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Regulasi/pelatihan ini sejalan dengan arahan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Regulasi tersebut juga sejalan dengan arahan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Gambar 42 - Tangkapan Layar Berita di website BPSDM Juli-September

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam periode bulan Oktober-Desember Tahun 2024, Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen perlahan melengkapi seluruh poin daftar informasi yang wajib disediakan melalui website BPSDM dan juga PUPR. Beberapa kendala yang menjadi perhatian kami, antara lain:

- a. Penutupan media sosial Pusbangkom Manajemen yang sebelumnya menjadi salah satu sarana utama pelayanan permohonan informasi publik menyebabkan sedikitnya permohonan yang dilayani; dan
- b. Kurangnya koordinasi terkait perubahan jadwal kegiatan pada beberapa waktu.

Berbagai permasalahan tersebut di atas perlu diatasi dengan rencana tindak lanjut sehingga layanan informasi publik Pusbangkom Manajemen dapat berjalan secara optimal.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka perbaikan layanan informasi publik Pusbangkom Manajemen, disusun beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yaitu:

- a. Koordinasi dengan PPID Utama mengenai mekanisme permohonan informasi melalui e-PPID; dan
- b. Meningkatkan frekuensi konfirmasi jadwal kegiatan dengan subkoor kegiatan terkait.

Evaluasi kegiatan PPID Pusbangkom Manajemen yang diterjemahkan melalui laporan Triwulan ataupun Tahunan diperuntukkan agar kualitas layanan PPID meningkat. Peningkatan kualitas layanan PPID Pusbangkom Manajemen terlihat dari penghargaan sebagai “Pelaksana PPID Terbaik Tingkat Pusat Tahun 2021”.



Gambar 43 - Pigam dan Sertifikat Penghargaan PPID Pusbangkom Manajemen